

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² dan mempunyai potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Hal ini merupakan modal yang besar bagi pembangunan ekonomi dan pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Sehingga peningkatan produksi perikanan diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data dari *The Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap laut dunia, peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia, dan peringkat ke-2 untuk produksi rumput laut di dunia.

Perikanan tangkap mengalami perlambatan pertumbuhan produksi dan cenderung mengalami stagnasi, dikarenakan jumlah hasil tangkapan yang telah mendekati produksi tangkapan lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*) adalah 80 persen dari MSY. Saat ini upaya pengelolaan penangkapan ikan di laut lebih diarahkan pada pengendalian dan penataan faktor produksi untuk menghasilkan pemanfaatan yang berkesinambungan. Selanjutnya, upaya peningkatan produksi perikanan budidaya perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, diantaranya terkait kualitas air dan pencemaran yang mungkin terjadi akibat pemberian pakan yang berlebihan, serta pembukaan lahan baru untuk tambak/kolam pemeliharaan ikan (Bappenas, 2014).



Sumber : Analisa Penulis & Bappenas (2021)

Gambar 1. 1
Tujuh Agenda Pembangunan

Istilah keberlanjutan (*sustainability*) sudah dimulai sejak Malthus (1798). SDGs merupakan penyempurnaan *Millennium Development Goals* (MDGs), MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*). Agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu; a) Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan (1) Berkualitas dan Berkeadilan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan. (2) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan. (3) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. (4) Kebudayaan Revolusi Mental dan Pembangunan. (5) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan

Dasar, b) Pilar pembangunan ekonomi: meliputi tujuan (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, c) Pilar pembangunan lingkungan: meliputi tujuan (6) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; dan (15) Ekosistem Daratan; d) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan (16) Perdamaian. TPB/SDGs memuat 17 Tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015.

Pemerintah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sesuai yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Contoh kebijakan yang ada adalah pengembangan energi terbarukan, seperti kebijakan mandatori B-30, pengembangan mobil listrik, serta pemanfaatan panas bumi dan tenaga surya. Lalu, *eco-tourism* dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berwawasan Lingkungan turut menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada lingkungan global, pemerintah terus berupaya memenuhi komitmen dalam *Paris Agreement*, yang dijalankan melalui pembangunan rendah karbon, yakni penurunan jumlah dan intensitas emisi pada berbagai bidang. Dalam *Nationally Determined Contributions* (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030.

Tahun 2050 merupakan tahun kedaulatan energi di Indonesia. Rasio elektrifikasi nasional mencapai 100%, produksi energi melimpah, emisi gas rumah kaca mulai menghilang, serta kesadaran masyarakat akan energi bersih juga meningkat (Kompas, 2021). Melalui uji coba perdagangan karbon pada sektor ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap [PLTU] yang telah diluncurkan pada 17 Maret 2021 merupakan upaya inovatif Pemerintah. Uji coba *Emission Trading System* dilakukan untuk mendorong efisiensi PLTU dan menurunkan emisi karbon. Untuk mewujudkan SDGs, perlu upaya kolektif dari pemerintah, perusahaan, media, dan lembaga pendidikan. Untuk sektor swasta, praktik *Environmental, Social and Governance* (ESG) atau sering disebut Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) harus diterapkan di seluruh aktivitas bisnis. Perusahaan harus dibangun agar bisa tahan terhadap risiko di masa depan, mengingat Indonesia berada di lokasi yang karakteristik geografisnya rentan bencana. Banyak kerugian yang akan ditanggung jika prinsip LST tidak dijalankan.

Sebaliknya, penerapan LST telah terbukti berdampak positif bagi kinerja perusahaan (Ekonomi Binis, 2021)

Blue economy lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan. Sedangkan *green economy* fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diiringi dengan penurunan risiko kerusakan lingkungan. Konsep *blue economy* (ekonomi biru), mengutamakan penjagaan kondisi ekologi yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Konsep “ekonomi biru” berusaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian atau peningkatan mata pencaharian sementara pada saat yang sama memastikan kelestarian lingkungan laut dan wilayah pesisir. Sumber daya laut terbatas dan kesehatan lautan telah menurun drastis karena aktivitas *antropogenik*. Perubahan-perubahan ini memengaruhi kesejahteraan manusia dan dampaknya kemungkinan besar akan meningkat di masa depan, terutama mengingat proyeksi pertumbuhan penduduk. Ekonomi biru memiliki komponen yang beragam, termasuk industri kelautan tradisional yang sudah mapan seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut, tetapi juga aktivitas baru dan yang sedang berkembang, seperti energi terbarukan lepas pantai, akuakultur, aktivitas ekstraktif dasar laut, serta bioteknologi dan bioprospeksi laut (Kompas, 2021)

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) memiliki dua permasalahan utama yang harus diselesaikan untuk mengimplementasikan *blue economy*, yaitu pengendalian jumlah tangkapan ikan yang dilakukan secara besar-besaran dan penanganan penangkapan ikan ilegal (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau *IUU Fishing*) yang dilakukan oleh pelaut dalam negeri dan luar negeri. Diketahui Indonesia masuk di antara daftar 3 negara yang masih melakukan penangkapan ikan secara bebas selain Vietnam dan Filipina. Penangkapan Terukur dan Penanganan *IUU Fishing* jadi fokus KKP implementasi *Blue Economy*. KKP sudah berhasil menangkap 135 kapal hingga September 2021. Rinciannya terdiri dari 88 kapal ikan asal Indonesia dan 47 kapal asing dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam (Berita.yahoo.com)

Penerapan model penangkapan ikan terukur ditargetkan bisa dijalankan pada awal tahun 2022. Pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga di pelabuhan yang tidak jauh dari wilayah penangkapan. Jadi, perekonomian di wilayah penangkapan dan sekitarnya bisa meningkat. Penangkapan terukur dibagi menjadi tiga zona dengan basis kuota untuk industri, nelayan tradisional, dan hobi. Pengembangan perikanan budidaya di Indonesia telah dilakukan melalui program-program inovatif yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diantaranya minapolitan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

35/ KEPMEN-KP/2013 tentang penetapan kawasan minapolitan di Indonesia), industrialisasi, dan ekonomi biru (KKP, 2014).

Fakta bahwa lautan dan laut penting untuk pembangunan berkelanjutan tidak dapat disangkal. Lautan dan lautan menutupi lebih dari dua pertiga permukaan bumi, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak, menyediakan makanan dan mineral, menghasilkan oksigen, menyerap gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim, menentukan pola cuaca dan suhu, dan berfungsi sebagai jalan raya untuk perdagangan internasional lintas laut. Dengan perkiraan 80 persen volume perdagangan dunia yang dibawa melalui laut, pelayaran dan pelabuhan internasional menyediakan hubungan penting dalam rantai pasokan global dan sangat penting bagi kemampuan semua negara untuk mendapatkan akses ke pasar global (UNCTAD 2016).

Peneliti Abd. Asis (2021), menyatakan bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan melalui berbagai sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan disiplin merupakan upaya represif yang dapat ditempuh melalui peraturan perundang-undangan atau beberapa aturan hukum di bidang perikanan yang mengandung sanksi pidana. Sedangkan Peneliti Siregar et al. (2019), menyatakan bahwa dampak emisi yang dihasilkan dari proses produksi bensin menggunakan *Life Cycle Assessment* (LCA) yang merupakan metode untuk menganalisis dampak suatu produk terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya.

Blue economy merupakan sebuah konsep baru yang diadaptasi dari *Green economy*. Indonesia merupakan negara maritim sehingga konsep ini bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan kelautan (Nurhayati, 2015). Peneliti Godfrey (2016) menyatakan bahwa konsep blue economy adalah hasil dari *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro pada 2012. Kebijakan ini dirasa dapat meningkatkan pendapatan Indonesia mengingat 60% masyarakat Indonesia bekerja di sektor perikanan sebagai nelayan. *Asia-Pacific Economy Corporation* (APEC), *blue economy* merupakan model yang mendorong pelaksanaan secara berkelanjutan juga mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan Indonesia (Rani dan Cahyasari, 2015). Kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas negara-bangsa dan lintas sektor publik-swasta, dan pada skala yang belum pernah dicapai sebelumnya. Realisasi ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Negara-negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS/*Small Island Developing*

States) dan Negara-negara Tertinggal (LDC/*Least Developed Countries*) ketika mereka beralih ke pengelolaan ekonomi biru mereka dengan lebih baik. (The Development, 2017)

Peneliti Karen Turner, et.al. (2021), menyatakan bahwa kemajuan untuk dipercepat di sekitar Acorn CCS, proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/*Carbon Capture and Storage*) yang bertujuan untuk mengatasi biaya modal yang tinggi dari penyebaran CCS, mendirikan pabrik Hidrogen Acorn pada tahun 2025 dan mengkatalisasi pertumbuhan bersih di wilayah tersebut secara lebih luas. Peneliti PuttenbS.FieldfT. et.al. (2021), menghasilkan informasi dasar yang memadai tersedia untuk memahami, memantau, dan mengelola wilayah terpencil dan relatif kurang dipelajari ini, eksplorasi ilmiah dilakukan antara tahun 2012 dan 2018 sebagai bagian dari Program Penelitian Kelautan Kimberley (KMRP). Peneliti Hamidy, et.al. (2016), menyatakan bahwa identifikasi daerah yang cocok untuk mengumpulkan limpasan adalah langkah penting dan perlu dalam menerapkan dan mengembangkan sistem pengumpulan limpasan di setiap sistem daerah tangkapan.

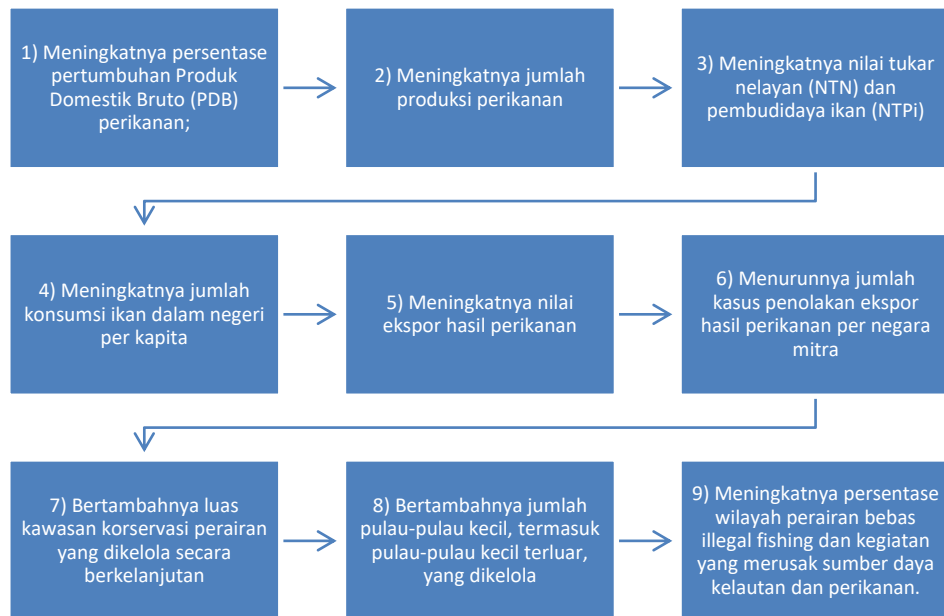
Peneliti, LópezGómezb (2021), menyatakan bahwa konflik dan tuntutan diselesaikan di pengadilan, yang akan memberikan area kritis baru untuk penelitian ilmu sosial tentang kebijakan kelautan. Sedangkan peneliti Schutter (2020), menyatakan bahwa tekanan dan tuntutan dari ekosistem laut dapat didamaikan melalui interaksi antar elemen masyarakat yang berbeda. Membandingkan sikap masyarakat terhadap aspek-aspek yang mendasari tata kelola membuka proses kekuasaan, memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang diperhitungkan, dan citra mana yang memimpin visi tata kelola. Juga peneliti Smith-Godfrey (2021) menyatakan bahwa perencanaan tata ruang laut ditinjau dengan tujuan mengalokasikan sumber daya Ekonomi Biru sebagai bagian dari institusionalisme, dan penghasil pendapatan bagi negara-negara nasional. LópezGómezb, Melanie G. et.al. (2021), hasil penelitiannya adalah implikasi potensial dari tindakan yang lemah, yang tidak akan mengatasi konflik sosio-ekologis yang sedang berlangsung terkait dengan akuakultur di Kanada dan di tempat lain.

Dalam penerapannya, pemerintah tidak hanya berfokus kepada *environmental friendly* saja melainkan juga menjadi *multiple cash flow* dimana itu berarti ada keuntungan berlipat secara ekonomi dengan mengolah limbah menjadi produk yang memiliki *value added*. Namun, masyarakat pesisir sebagai pemilik interdependensi yang tinggi terhadap sumber daya pesisir dalam kehidupan realita masih belum mengalami kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari sektor pendidikan yang rendah serta lingkungan permukiman yang masih terkesan kumuh. Oleh karena itu, dalam penerapakan kebijakan ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat pesisir (Prayuda dan Sary, 2019).

Menurut Sitorus (2018), *blue economy* hadir salah satunya untuk memperbaiki aspek hukum dan kelembagaan dalam pengawasan kelautan di Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan. Membangun pembangkit listrik dengan sumber terbarukan secara gotong royong, bersama-sama beralih ke mobil dan motor listrik demi menjaga perubahan iklim di bumi, dan tentu saja bersama-sama untuk menghemat energi. Jika tidak, tahun 2050 mungkin akan menjadi tahun krisis energi yang mengerikan untuk Indonesia. Visi Indonesia tahun 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Paradigma perekonomian berbasis *Resource-based Economy* harus bertransformasi menjadi *Innovation-based Economy*. Perkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi yang kuat.

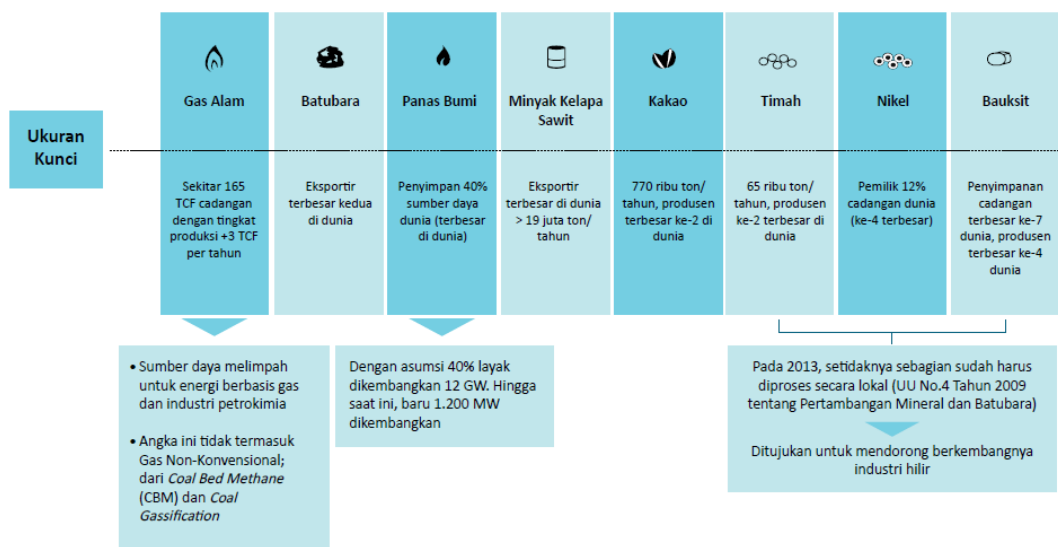
Dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk bidang perikanan, tidak hanya aspek ekonomi semata yang perlu dikembangkan, namun juga aspek sosial dan ekologi, agar aktivitasnya dapat berkelanjutan. Dari 9 IKU yang ditetapkan, terdapat lima IKU, meliputi ; 1) meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan; 2) meningkatnya jumlah produksi perikanan; 3) meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN) dan pembudidaya ikan (NTPi); 5) meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan; dan 6) menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra;) yang fokus pada aspek ekonomi, sedangkan untuk aspek sosial hanya 2 IKU (IKU 4) meningkatnya jumlah konsumsi ikan dalam negeri per kapita; dan 8) bertambahnya jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar, yang dikelola; dan aspek ekologi juga dua IKU (IKU 7) bertambahnya luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan; dan 9) meningkatnya persentase wilayah perairan bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan).

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pembangunan perikananannya seperti tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-2042, yakni:



Sumber : Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-2042

Gambar 1. 2
Sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU)



Gambar 1. 3
Potensi Sumber Daya Alam

Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di Dunia, 17.480 buah pulau, wilayah perairan laut 5,8 juta km² (3,1 juta km² laut territorial dan 2,7 juta km² laut ZEEI) dan panjang garis pantai 104.000 km. Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral).



Gambar 1. 4
Letak Geografis & 6 Large Marine Ecosystem Indonesia

Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu *Sea Lane of Communication* (SLoC), yaitu Selat Malaka. Indonesia memiliki akses langsung kepada enam wilayah LME (*Large Marine Ecosystem*) yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar.

Data Luas Perairan dan Kawasan Konservasi di WPPNRI 712:

WPPNRI	Luas WPPNRI (Ha)	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	
		2017	2020
712	41,746,572.34	397,777.97	663,876.18

Sumber : DJPRL, 2021

Gambar 1. 5

Data Luas Perairan dan Kawasan Konservasi di WPPNRI 712

Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 - 2019 (dalam ton) :

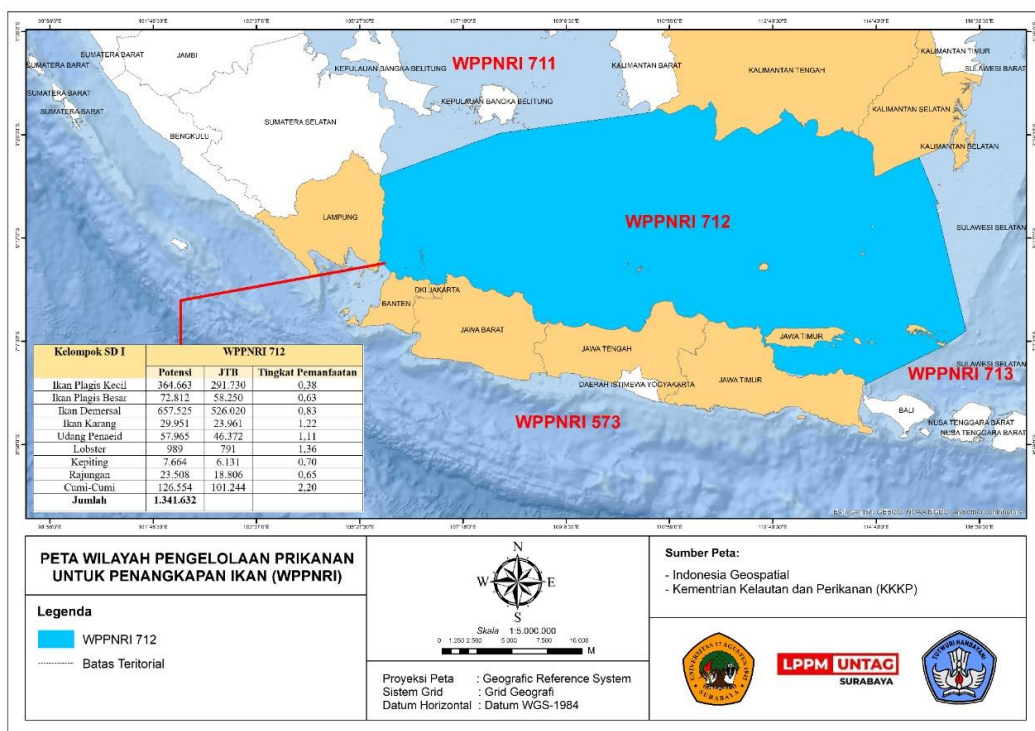
WPPNRI	2016	2017	2018	2019
712	1,319,714	1,106,630	1,178,935	1,064,051

Sumber : Satu Data KKP

Gambar 1. 6

Data Produksi Perikanan Tangkap di WPPNRI 712

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712. Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) adalah : 1) WPP-RI 571: Selat Malaka dan Laut Andaman. 2) WPP-RI 572 : Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda. 3) WPP-RI 573 : Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa Hingga Sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor. 4) WPP-RI 711 : Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. 5) WPP-RI 712 : Laut Jawa. 6) WPP-RI 713 : Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali. 7) WPP-RI 714 : Teluk Tolo dan Laut Banda. 8) WPP-RI 715 : Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. 9) WPP-RI 716 : Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera. 10) WPP-RI 717 : Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik. 11) WPP-RI 718 : Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur. (Prof. Dr. Ali Suman, Kepala Balai, 2014).



Sumber : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi DKI Jakarta (2021)

Gambar 1. 7
Peta Wilayah Perencanaan

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi DKI Jakarta. Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi DKI Jakarta adalah materi teknis muatan perairan pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang sangat tinggi. Potensi tersebut antara lain memiliki luas perairan sebesar 11 kali luas daratannya termasuk hamparan 113 pulau di Kepulauan Seribu dengan potensi alam dan karakteristik yang unik. Namun sebagai Ibukota Negara, Jakarta yang berkembang menjadi kota jasa dan perdagangan serta pusat aktivitas pemerintahan yang memiliki peran yang strategis baik secara nasional

maupun internasional, rentan terhadap perubahan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang.

1.2 Rumusan masalah

Dari masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara memanfaatkan sumber daya alam berbasis Blue Economy pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok?
2. Bagaimanakah proses Analisa SWOT dalam penentuan Strategi Implementasi Blue Economy pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok?
3. Bagaimanakah Model AHP dalam pemilihan prioritas Strategi Implementasi Blue Economy pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian dan pernyataan masalah diatas, maka tujuan dari makalah ini adalah :

1. Mengidentifikasi cara pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam berbasis Blue Economy pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok.
2. Mengkaji Analisa SWOT dalam pemilihan Strategi Implementasi Blue Economy pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok.
3. Mengevaluasi Model AHP dalam pemilihan prioritas Strategi Implementasi Blue Economy pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Dinas Kesatuan dan Kebangsaan dan Politik (KESBANGPOL) dapat menambah data dan informasi tentang “Strategi Implementasi *Blue Economy*”.
2. Bagi Dinas Kelautan, Pangan, Peternakan dan Perikanan (DKP3) dapat menambah data dan informasi tentang “Strategi dan Langkah-langkah prioritas Implementasi *Blue Economy*” khususnya pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok sehingga dapat membantu pengambil kebijakan.
3. Bagi Balai Riset Inovasi Nasional (BRIN) dapat menambah data dan informasi tentang “Strategi dan Langkah-langkah prioritas Implementasi *Blue Economy*”.
4. Bagi Kecamatan dan Kelurahan di Depok dapat menambah pengetahuan tentang *Blue Economy* dan Budidaya berbasis ekonomi biru.

5. Bagi Kelompok Budidaya Ikan Hias (POKDAKAN) dapat menambah pengetahuan tentang *Blue Economy* dan Budidaya berbasis ekonomi biru.
6. Bagi Akademis, dapat memberi kontribusi yang signifikan pada pengembangan ilmu yang relevan dengan masalah penelitian. Juga diharapkan dapat memperkuat khasanah teori-teori dan untuk penelitian lanjutan dalam bidang Strategi Implementasi *Blue Economy* pada Budidaya Ikan Hias Tetra di Kecamatan Bojongsari Depok dan bagi pihak lain sebagai referensi ilmiah bagi penulisan lebih lanjut pada masalah yang berkaitan.

Halaman ini sengaja dikosongi